LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021
BULAN OKTOBER DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Senin, 8 November 2021

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Para Kepala Bidang
2. Para Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Dinas
3. Para Kasi
4. Bendahara Pengeluaran
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu
6. Pejabat Verifikasi Pejabat Pengadaan Barang /Jasa

D. Notulis

Pelaksana Sub Bag Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 81,64 %

b.Keuangan = 15.306.732.634 (74,30%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
Administrasi Umum							
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	14.500.000			3.400.000		
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.500.000	78,18	37,47	3.400.000	(40,71)	Akibat pemberlakuan PPKM, penyerapan Belanja Perjalana Dinas Luar Daerah kurang optimal
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	15.750.000			13.125.000		

1		Pertemuan Rutin Pengurus dan Pelaksanaan Program Kerja FAN Jateng	15.750.000	100	83,33	13.125.000	(16,67)	Bulan Agustus masih PPKM jadi tidak bisa dilaksanakan
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	35.160.000			30.245.000		
1		Advokasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak	35.160.000	100	89,35	30.245.000	(10,65)	Ada kebijakan PPKM
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE								
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal								
		Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.481.379.000			1.159.629.000		
1		Pelayanan KB MKJP	1.481.379.000	79,77	79,28	1.159.629.000	(0,49)	Masih terkendala beberapa faskes (rumah sakit/klinik) yang belum bisa melayani pelayanan KB secara massal, terutama KB MKJP (MOW, MOP, IUD)
		Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	83.030.000			44.934.000		
1		Pengembangan Model KIE tentang KB-KS	83.030.000	100	93,00	44.934.000	(7,00)	dilaksanakan setelah anggaran perubahan bulan November 2021

	Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	5	0	0			

Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	21	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

Pada Bulan Oktober terdapat 5 kegiatan yang mengalami deviasi antara lain :

1. Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dikarenakan pemberlakuan PPKM, penyerapan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah kurang optimal.
2. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Provinsi terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu pertemuan rutin pengurus dan pelaksanaan program kerja FAN jateng dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah tentang PPKM, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan secara luring.
3. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Advokasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah tentang PPKM, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan tersebut secara luring.
4. Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Pelayanan KB MKJP dikarenakan Masih terkendala beberapa faskes (rumah sakit/klinik) yang belum bisa melayani pelayanan KB secara massal, terutama KB MKJP (MOW, MOP, IUD).
5. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Pengembangan model KIE tentang KB-KS dikarenakan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan setelah anggaran perubahan bulan November 2021.

Upaya

Upaya mengatasi permasalahan 5 kegiatan yang mengalami deviasi negatif yaitu pada bulan November untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan 5 kegiatan tersebut.

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

Rencana Kegiatan di Bulan November sebagai berikut:

Sekretariat

1. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
7. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
15. Pendidikan dan Pelatihan formal.

Bidang Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan

1. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada Organisasi kemasyarakatan kewenangan Provinsi.
2. Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kab/Kota.
3. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
4. Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Provinsi.
5. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraaan Gender (KG) dan Hak Anak dalam kewenangan Provinsi.

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi.
2. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintahan, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
3. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
4. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

1. Kegiatan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja.
2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi.
3. Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
4. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan keluarga melalui Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan KIE

1. Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal.

Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat

1. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi.
2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi.
3. Kegiatan Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Provinsi.
4. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi.
5. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi.
6. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi kemasyarakatan Tk. Daerah Prov. Dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan kesertaan Ber-KB.
7. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan Tk. Daerah Prov dalam Pembangunan keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

V. PENUTUP

Kesimpulan rapat koordinasi pengendalian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tersebut adalah sebagai berikut :

1. APBD Perubahan telah di sahkan, diharapkan Kabid/Kasi/Kasubag melaksanakan kegiatan dengan cermat sesuai anggaran pasca perubahan.
2. DimohonÂ Kabid/Kasi/Kasubag segera meningkatkan serapan capaian, mengingat bulan ini sudah memasuki TW IV.
3. Dimohon bidang yang memiliki kegiatan di Desa Dampingan untuk segera melakukan kegiatan di desa tersebut dalam rangka optimalisasi akselerasi pelaksanaan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaÂ Provinsi Jawa Tengah bulan Oktober 2021, untuk menjadikan periksa.

Semarang, Senin 8 Novermber 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PERREMPUAN, PERLIDNUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELAURAGA BERENCANA

Dra. RETNO SUDEWI, Apt.MSi,MM
NIP. 196811241993102001